

INVENTARISASI SUMBER INFORMASI DOKUMENTER DAN NON-DOKUMENTER UNTUK DOKUMENTASI BUDAYA

Kusnandar^{1, 3}, Samson CMS², dan Evi Nursanti Rukmana³

^{1,2,3}Program Studi Perpustakaan dan Sains Informasi, Departemen Komunikasi dan Informasi,

^{1,2,3}Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Padjadjaran.

Email: ¹kusnandar@unpad.ac.id, ²samson.cms@unpad.ac.id, dan ³evi.nursanti.rukmana@unpad.ac.id

ABSTRAK. Sebagai ahli informasi, pustakawan dan arsiparis dapat berkontribusi dalam kegiatan dokumentasi budaya dengan cara memilih serta menyediakan sumber-sumber informasi dokumenter dan non-dokumenter yang kredibel terkait dengan suatu karya budaya. Melalui artikel ini, penulis bermaksud menyajikan tentang inventarisasi sumber informasi dokumenter dan non-dokumenter dengan penyajiannya mengacu pada beberapa pertanyaan berikut: Apa yang dimaksud dengan sumber informasi dokumenter dan non-dokumenter untuk dokumentasi budaya?; Bagaimana inventarisasi sumber informasi dokumenter untuk dokumentasi budaya?; dan Bagaimana inventarisasi sumber informasi non-dokumenter untuk dokumentasi budaya? Artikel ini disusun berdasarkan studi pustaka dari berbagai sumber bertema sumber informasi dokumenter dan non-dokumenter. Adapun hasil studi pustaka tersebut adalah sebagai berikut: (1) Sumber informasi dokumenter merupakan sumber informasi tentang suatu karya budaya yang sudah terekam dalam media rekaman. Sementara itu, sumber informasi non-dokumenter adalah sumber informasi tentang suatu karya budaya yang belum terekam dan diperoleh secara langsung dari sumber perorangan, kelompok atau pun lembaga. (2) Inventarisasi sumber informasi dokumenter dapat berupa Bibliografi Beranotasi dari sumber informasi primer dan sekunder. Pemilihan sumber informasi dokumenter yang kredibel menggunakan prinsip CRAAP (*Currency, Relevance, Authority, Accuracy, and Purpose*). (3) Inventarisasi sumber informasi non-dokumenter dapat berbentuk Profil Ahli Budaya dan Profil Lembaga Budaya. Selain itu, dapat juga menggunakan prinsip dan teknik Pemetaan Budaya untuk menyusun profil sumber informasi non-dokumenter seraya menandai lokasi geografis dari sumber informasi tersebut di dalam sebuah peta bumi. Dalam menentukan kredibilitas sumber informasi non-dokumenter, perlu memperhatikan beberapa hal yaitu: (1) daftar karya tulis dari seorang Ahli/Pelaku Budaya Formal; (2) intensitas enkulturasi, sumber enkulturasi, motivasi enkulturasi, serta rekognisi dan otoritas sosial dari seorang Ahli/Pelaku Budaya Non-formal; (3) adanya kejelasan tujuan dan masa eksistensi yang cukup lama dari Lembaga Budaya Non-pemerintah. Sementara itu, Lembaga Budaya Pemerintah lazimnya memiliki kredibilitas yang tinggi sebagai sumber informasi mengingat adanya tuntutan akuntabilitas dan kinerja yang baik dalam pelayanan publik.

Kata-kata Kunci: Sumber Informasi Dokumenter; Sumber Informasi Non Dokumenter; Dokumentasi Budaya

INVENTORYING DOCUMENTARY AND NON-DOCUMENTARY INFORMATION SOURCES FOR CULTURAL DOCUMENTATION

ABSTRACT. As information experts, librarians and archivists can contribute to cultural documentation activities by selecting and providing credible sources of documentary and non-documentary information related to cultural work. Through this article, the author intends to present an inventory of documentary and non-documentary information sources by referring to the following questions: What is meant by documentary and non-documentary sources of information for cultural documentation?; How to inventory documentary information sources for cultural documentation?; and How to inventory non-documentary sources of information for cultural documentation? This article was compiled based on literature studies from various sources on documentary and non-documentary information sources. The results of the literature study are as follows: (1) Documentary sources of information are sources of information about a cultural work that has been contained in a recording medium. Meanwhile, non-documentary information sources are sources of information about a cultural work that has not been recorded and obtained directly from individual sources, groups or institutions. (2) Inventory of documentary information sources can be in the form of Annotated Bibliography from primary and secondary information sources. The selection of credible sources of documentary information uses the principles of CRAAP (*Currency, Relevance, Authority, Accuracy, and Purpose*). (3) Inventory of non-documentary sources of information may take the form of Profiles of Cultural Experts and Profiles of Cultural Institutions. In addition, you can also use the principles and techniques of Cultural Mapping to build a profile of non-documentary information sources while marking the geographic location of these information sources on a map of the earth. In determining the credibility of non-documentary sources of information, it is necessary to pay attention to several things, namely: (1) a list of written works by a Formal Cultural Expert/Performer; (2) the intensity of enculturation, sources of enculturation, motivation for enculturation, as well as social recognition and authority from an expert/performer of non-formal culture; (3) there is clarity of purpose and a long period of existence for the Non-Governmental Cultural Institution. Meanwhile, government cultural institutions usually have high credibility as a source of information given the demands for accountability and exemplary performance in public services.

Keywords: *Documentary Information Sources; Non-Documentary Information Sources; Cultural Documentation*

Korespondensi: Kusnandar. Program Studi Perpustakaan dan Sains Informasi, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Padjadjaran. alan Raya Ir. Sukarno No.KM 21, Hegarmanah, Kec. Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45363. *E-mail:* kusnandar@unpad.ac.id

PENDAHULUAN

Pembangunan kesadaran setiap suku bangsa atas pentingnya melestarikan warisan budaya mereka menjadi hal yang harus diperhatikan oleh masing-masing penyelenggara negara, terlebih sejak diterbitkannya *Universal Declaration on Cultural Diversity* oleh UNESCO pada tanggal 2 November 2001. Pada deklarasi tersebut dinyatakan bahwa *"Culture takes diverse forms across time and space. This diversity is embodied in the uniqueness and plurality of the identities of the groups and societies making up humankind. As a source of exchange, innovation and creativity, cultural diversity is as necessary for humankind as biodiversity is for nature"* (UNESCO, 2002, 10). Implikasi dari diterbitkannya deklarasi UNESCO ini adalah bahwa setiap penyelenggara negara didorong untuk dapat menjaga dan melestarikan warisan budaya yang berada di masing-masing wilayah kenegaraannya.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh setiap negara, termasuk tentunya Indonesia, adalah dengan menyelenggarakan program dokumentasi budaya sebagai upaya penyelamatan warisan budaya. Dokumentasi budaya yang dimaksud pada tulisan ini adalah "prinsip dan teknik yang digunakan untuk mendokumentasikan pengetahuan lokal sebagai upaya pelestarian warisan budaya tak benda suatu suku bangsa melalui serangkaian kegiatan inventarisasi dan perekaman untuk menghasilkan dokumen berupa inventaris dan rekaman budaya dalam berbagai format, antara lain: teks, grafis, foto, audio, maupun video yang dapat dijadikan sebagai bukti kekayaan warisan budaya tak benda suatu suku bangsa sekaligus sebagai media pembelajaran budaya khususnya bagi generasi penerus suku bangsa tersebut" (Kusnandar, Erwina & CMS, 2020, 4).

Sebagaimana yang dijelaskan di atas bahwa salah satu kegiatan dokumentasi budaya adalah inventarisasi warisan budaya takbenda. Terkait dengan pelaksanaan inventarisasi ini, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia, menerbitkan "Buku Panduan Praktis Pencatatan Warisan Budaya Takbenda Indonesia" pada tahun 2009. Pada buku tersebut terdapat "Formulir Pencatatan Warisan Budaya TakBenda Indonesia" yang

dapat digunakan masyarakat dalam melakukan inventarisasi atau pencatatan suatu karya budaya di wilayah masing-masing.

Penerbitan "Formulir Pencatatan Warisan Budaya TakBenda Indonesia" oleh Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia tentunya akan sangat membantu masyarakat dalam menginventarisasi warisan budaya takbenda mereka. Namun demikian, berdasarkan penelaahan penulis terhadap formulir tersebut, ada beberapa komponen yang perlu diperhatikan dalam pengisian data terkait dengan warisan budaya takbenda. Di antara sekian data yang harus diisi ke dalam formulir tersebut, ada dua bagian penting yang dalam pengisiannya membutuhkan sumber informasi terpercaya atau kredibel, yakni bagian "Sejarah Singkat Karya Budaya" dan "Deskripsi Singkat Karya Budaya". Untuk mengisi data pada kedua bagian tersebut dibutuhkan sumber informasi tertulis (dokumenter) maupun sumber informasi lisan (non-dokumenter) yang kredibel atau dipercaya. Pada prakteknya, ada kemungkinan masyarakat yang akan melakukan pencatatan warisan budaya takbenda mengalami kendala dalam memastikan kredibilitas sumber informasi baik sumber tertulis maupun sumber lisan. Jika hal tersebut terjadi maka masyarakat dapat mengandalkan pihak yang berprofesi atau memiliki kompetensi dalam menentukan kredibilitas sumber informasi. Adapun pihak atau profesi yang memiliki kompetensi tersebut yakni antara lain pustakawan dan arsiparis sebagai ahli informasi yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dalam mendapatkan sumber informasi tertulis (dokumenter) dan lisan (non-dokumenter) yang kredibel.

Pustakawan dan arsiparis dapat membantu masyarakat melaksanakan kegiatan pencatatan warisan budaya takbenda dengan cara menyediakan data sumber-sumber informasi yang kredibel, baik tertulis (dokumenter) maupun lisan (non-dokumenter) agar dapat dijadikan acuan dalam pengisian data pada "Formulir Pencatatan Warisan Budaya TakBenda Indonesia" yang diterbitkan oleh Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia. Peran yang diharapkan dari pustakawan dan arsiparis dalam menyediakan sumber informasi yang kredibel ini senada dengan pernyataan dari *International Federation of Library Associations*

and Institutions (IFLA) terkait dengan pengetahuan tradisional melalui *Statement on Indigenous Traditional Knowledge* pada tahun 2019. Salah satu rekomendasi yang terdapat dalam pernyataan IFLA (2019) tersebut yaitu: “... in order to ensure its continuing preservation, access and elaboration recommends that libraries and archives: ...Make available and promote information resources which support research and learning about indigenous and local traditional knowledge, its importance and use in modern society...”. IFLA menegaskan bahwa pustakawan dan arsiparis hendaknya memastikan ketersediaan sumber-sumber informasi relevan untuk mendukung kegiatan penelitian dan pembelajaran pengetahuan tradisional,

Berdasarkan latar belakang di atas, melalui artikel ini, penulis bermaksud menjelaskan tentang inventarisasi sumber informasi dokumenter dan non-dokumenter untuk mendukung kegiatan dokumentasi budaya. Secara khusus kegiatan inventarisasi sumber informasi dokumenter dan non-dokumenter dikaitkan dengan peran yang dapat dilakukan profesi pustakawan dan arsiparis dalam kegiatan tersebut. Adapun hal yang menjadi fokus pada artikel ini yaitu:

1. Apa yang dimaksud dengan sumber informasi dokumenter dan non-dokumenter untuk dokumentasi budaya?
2. Bagaimana inventarisasi sumber informasi dokumenter untuk dokumentasi budaya?
3. Bagaimana inventarisasi sumber informasi non-dokumenter untuk dokumentasi budaya?

METODE

Artikel ini disusun berdasarkan studi pustaka dari berbagai sumber yang berhubungan dengan topik Sumber Informasi Dokumenter dan Non-Dokumenter (*Documentary and Non-Documentary Information Sources*). Selanjutnya, hasil studi pustaka tersebut dipaparkan secara sistematis mengacu pada pertanyaan yang diajukan oleh penulis pada bagian akhir pendahuluan artikel ini. Kemudian, sebagai penutup, disajikan kesimpulan pada bagian akhir artikel ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sumber informasi dokumenter dan non-dokumenter untuk dokumentasi budaya

Gurdev Singh, seorang Pustakawan profesional di *Sri Guru Gobind Singh College of*

Commerce, University of Delhi melalui bukunya berjudul “*Information sources, services and systems*” menjelaskan jenis-jenis sumber informasi. Singh (2013) membagi jenis sumber informasi ke dalam dua kategori, yakni:

1. Sumber Dokumenter (*Documentary Sources*) adalah sumber formal. Sumber-sumber ini adalah informasi tertulis atau rekaman. Lebih lanjut, Sumber dokumenter dapat dikategorikan menjadi sumber primer, sumber sekunder, dan sumber informasi tersier.
2. Sumber Non-Dokumenter (*Non-Documentary Sources*) adalah komunikasi lisan atau verbal. Sumber non-dokumenter selanjutnya dapat dibagi menjadi sumber informasi formal dan informal. Sumber formal termasuk organisasi penelitian, masyarakat terpelajar dan profesional, departemen pemerintah, lembaga akademik, dan lain sebagainya. Sumber informal dapat mencakup diskusi atau percakapan dengan para ahli, menghadiri pertemuan dan konferensi profesional, dan lain sebagainya.

Berdasarkan pembagian kategori sumber informasi yang digagas oleh Gurdev Singh di atas, maka dalam artikel ini penulis mengembangkan konsep sumber informasi dokumenter dan non-dokumenter yang berkaitan dengan kegiatan dokumentasi budaya sebagai berikut:

1. *Sumber informasi dokumenter* dalam konteks dokumentasi budaya merupakan sumber informasi tentang suatu karya budaya yang sudah terekam atau tertuang dalam media rekaman. Sumber informasi dokumenter dapat berupa sumber informasi primer yang pada umumnya berupa arsip personal atau organisasi, misalnya: catatan pribadi atau tulisan seorang ahli/tokoh budaya, foto-foto berkaitan dengan suatu karya budaya, dan sebagainya. Dalam hal ini, sumber informasi dokumenter yang termasuk kategori primer bisa juga berupa naskah kuno/ manuskrip yang tentunya berisi tulisan tentang pengetahuan lokal yang sangat berguna untuk memahami nilai-nilai penting warisan budaya. Selain sumber informasi primer, sumber informasi dokumenter juga dapat berupa sumber informasi sekunder, yakni berupa artikel jurnal, artikel prosiding, laporan penelitian, atau buku-buku terkait dengan suatu karya budaya.
2. *Sumber informasi non-dokumenter* yang berkaitan dengan dokumentasi budaya adalah sumber informasi tentang suatu karya budaya yang belum terekam dan diperoleh

secara langsung dari sumber perorangan, kelompok atau lembaga. Lebih lanjut, dalam artikel ini, penulis membagi sumber informasi non-dokumenter ke dalam empat jenis, yakni:

- *Ahli/Pelaku Budaya Formal*, misalnya: Peneliti Budaya, Antropolog Budaya, Sejarawan Budaya, Filolog, dan lain-lain.
- *Ahli/Pelaku Budaya Non-formal*, misalnya: tokoh adat, sesepuh atau orang yang dituakan, seniman, budayawan, dan lain-lain.
- *Lembaga Budaya Pemerintah*, misalnya: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Lembaga Penelitian, Museum, Perpustakaan, dan lain-lain.
- *Lembaga Budaya Non-pemerintah*, misalnya: Komunitas Budaya, Komunitas Seni, Paguyuban Seni, dan lain-lain.

Inventarisasi sumber informasi dokumenter untuk dokumentasi budaya

Sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa sumber informasi dokumenter dapat berupa sumber informasi primer dan sekunder. Kedua jenis sumber informasi tersebut pada umumnya disimpan dan dikelola oleh institusi memori yang menjadi pusat sumber informasi seperti perpustakaan dan arsip. Sebagai pusat sumber informasi, perpustakaan dan arsip hendaknya mampu menyediakan sumber-sumber informasi yang berkaitan dengan warisan budaya. Selain itu, perpustakaan dan arsip perlu menyediakan sarana akses ke sumber-sumber informasi tersebut, antara lain berupa katalog, abstrak, dan indeks untuk mempermudah pengguna perpustakaan dan arsip dalam melakukan penelusuran sumber-sumber informasi tersebut.

Sarana akses ke sumber-sumber informasi lainnya yang dapat disediakan oleh perpustakaan dan arsip adalah Bibliografi Beranotasi (*Annotated Bibliography*). Dalam hal ini, *Concordia University Library* (2020), menjelaskan bahwa Bibliografi Beranotasi merupakan daftar sumber informasi berupa buku, artikel jurnal, dan lain-lain. Dalam Bibliografi Beranotasi, setiap sumber informasi diberi keterangan bibliografis seperti nama pengarang, judul, tahun terbit, penerbit, dan sebagainya. Disamping keterangan bibliografis, sumber-sumber informasi yang berada dalam daftar tersebut disertai anotasi berupa paragraf deskriptif dan evaluatif singkat yang terdiri dari 4-5 kalimat (sekitar 150 kata atau lebih). Anotasi

yang menyertai keterangan bibliografis tersebut harus dapat mengindikasikan secara jelas kepada pembaca tentang relevansi, akurasi, dan kualitas setiap sumber informasi yang ada dalam Bibliografi Beranotasi.

Agar perpustakaan dan arsip dapat menyajikan Bibliografi Beranotasi yang berkualitas, maka pustakawan atau arsiparis perlu memperhatikan beberapa hal berikut terkait dengan pemilihan sumber-sumber informasi yang akan dihimpun, yakni menggunakan prinsip CRAAP, singkatan dari *Currency*, *Relevance*, *Authority*, *Accuracy*, dan *Purpose* (George, 2021). Lebih lanjut penerapan prinsip CRAAP dalam memilih sumber informasi dokumenter untuk dokumentasi budaya dijelaskan sebagai berikut:

- *Currency* atau Kemutakhiran: Apakah sumber informasi tersebut mutakhir? Pada umumnya kemutakhiran menjadi penting untuk dipertimbangkan dalam penyediaan sumber informasi mengingat tulisan yang mutakhir dapat menunjukkan perkembangan terakhir suatu bidang kajian. Meskipun demikian, dalam beberapa kasus tertentu, informasi yang lebih lama bisa dianggap bernilai guna, terutama untuk memenuhi kebutuhan informasi yang menyangkut sejarah perkembangan suatu bidang kajian.
- *Relevance* atau Relevansi: Apakah sumber informasi yang dihimpun relevan dengan kebutuhan pengguna? Dalam konteks dokumentasi budaya, aspek relevansi ini bisa dikaitkan dengan tema karya budaya yang akan dikaji dalam kegiatan dokumentasi budaya. Misalnya, untuk membantu seseorang yang ingin melakukan dokumentasi budaya tentang Seni Tari Jaipongan, maka sumber-sumber informasi yang perlu dihimpun oleh pustakawan atau arsiparis adalah tulisan-tulisan berupa artikel, buku, atau laporan penelitian yang berkaitan dengan Seni Tari Jaipongan.
- *Authority* atau Otoritas: Di mana sumber informasi tersebut diterbitkan? Siapa penulisnya? Apakah penulis tersebut dianggap memiliki reputasi dan dapat dipercaya sebagai ahli di bidangnya? Suatu sumber informasi dapat dianggap memiliki kualitas informasi yang terpercaya jika penerbitnya dikenal dan diakui reputasi baiknya oleh publik. Selain itu, kredibilitas penulis suatu sumber informasi juga turut menentukan kualitas sumber informasi. Dengan kata lain, seorang penulis yang dianggap pakar dalam suatu karya budaya akan memiliki kepercayaan publik atas karya

tulisnya tentang suatu karya budaya. Misalnya, seorang ahli filologi sebagai akademisi atau peneliti naskah kuno yang menulis artikel atau buku tentang isi suatu naskah kuno akan lebih dipercaya kualitas tulisannya dibandingkan penulis lain yang tidak memiliki latar belakang pendidikan formal dalam bidang filologi.

- *Accuracy* atau Akurasi: Apakah sumber informasi didukung oleh bukti empirik atau argumentasi yang berdasar? Apakah sumber-sumber tulisan dari penulis lain yang menjadi pendukung argumentasi dalam suatu karya tulis dikutip dengan benar? Akurasi dalam suatu karya tulis sebagai sumber informasi akan memiliki kualitas informasi yang baik jika apa yang disampaikan dalam tulisan tersebut memiliki bukti empirik atau setidaknya merujuk pada pendapat penulis-penulis lain yang kredibel. Misalnya dalam suatu tulisan tentang Obat-obatan Tradisional, di dalamnya dipaparkan tentang khasiat tanaman atau tumbuhan yang dapat menjadi sebab penyembuh suatu penyakit. Penjelasan tentang khasiat tanaman obat tersebut didukung pernyataan dari narasumber ahli atau pelaku budaya di bidang obat tradisional. Disamping itu, tulisan tersebut juga didukung oleh sumber tertulis lainnya dari naskah kuno dan beberapa rujukan penelitian dalam bidang Obat-obatan Tradisional yang dilakukan oleh para peneliti atau akademisi di bidang yang berkaitan, misalnya para peneliti bidang Etnofarmasi. Dengan demikian, tulisan tentang Obat-obatan Tradisional tersebut dapat dikatakan memiliki akurasi yang kuat.
- *Purpose* atau Tujuan: Apa motif tertentu di balik penerbitan sumber informasi ini? Dalam beberapa kasus, terkadang suatu tulisan ilmiah tidak semata menyajikan fakta ilmiah, melainkan mungkin saja memiliki maksud atau motif tersembunyi. Misalnya, dalam suatu tulisan artikel ilmiah tentang penelitian suatu produk kesehatan, bisa jadi memiliki motif tersembunyi karena berkaitan dengan lembaga yang menjadi sponsor penelitian tersebut. Dalam hal ini, ada kemungkinan terdapat bias dalam kesimpulan penelitiannya dikarenakan ada 'pesan sponsor' yang menghendaki produk kesehatan tersebut dapat meningkat penggunaannya akibat dipublikasikan melalui artikel ilmiah hasil penelitian. Dalam konteks tulisan-tulisan yang berkaitan dengan suatu karya budaya, pada umumnya sangat kecil kemungkinannya terdapat motif terselubung

untuk kepentingan pihak-pihak tertentu. Meskipun demikian, pustakawan atau arsiparis yang menghimpun sumber-sumber informasi tentang suatu karya budaya untuk kepentingan dokumentasi sebaiknya tetap waspada dan teliti terkait dengan biasanya suatu tulisan disebabkan adanya tujuan penulisan yang memiliki muatan atau motif tersembunyi tersebut.

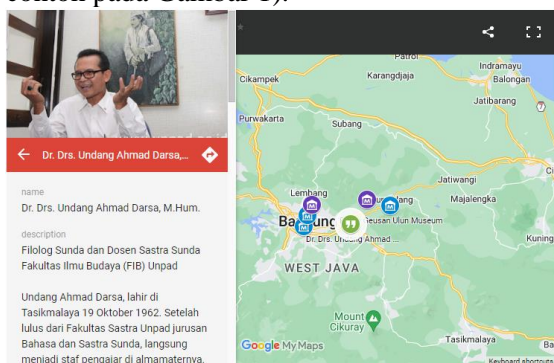
Inventarisasi sumber informasi non-dokumenter untuk dokumentasi budaya

Selain penyediaan akses terhadap sumber informasi dokumenter, pustakawan dan arsiparis juga dapat berkontribusi dalam menyediakan akses informasi non-dokumenter bagi pengguna perpustakaan dan arsip untuk kepentingan dokumentasi budaya. Sebagaimana yang sudah diulas sebelumnya, sumber informasi non-dokumenter dapat berupa sumber perorangan, kelompok atau lembaga. Pustakawan atau arsiparis dapat menyediakan akses terhadap sumber informasi non-dokumenter dengan cara menyusun dokumen (cetak ataupun digital) yang memuat informasi berupa daftar serta keterangan yang memadai tentang sumber perorangan, kelompok atau lembaga tersebut yang dianggap memiliki informasi atau pengetahuan tentang suatu karya budaya.

Salah satu bentuk dokumen yang dapat memuat informasi tentang sumber perorangan, kelompok atau lembaga adalah Sketsa Biografi atau yang lebih dikenal dengan Profil. Menurut Hood (2013), Sketsa Biografi atau Profil adalah sebuah tulisan yang mendeskripsikan karakter seseorang, gambaran umum tentang kisah hidup seseorang, serta sorotan pencapaian seseorang. Selain mendeskripsikan seseorang, Profil juga dapat digunakan untuk mendeskripsikan sebuah lembaga atau organisasi. Profil organisasi pada dasarnya berisi informasi singkat tentang sejarah dan evolusi perusahaan, sejarah kinerja dan kinerja yang diantisipasi di masa depan, reputasi perusahaan dan detail barang dan jasa yang disediakan oleh mereka (MBA Skool Team, 2012). Dalam hal ini, pustakawan atau arsiparis dapat menyusun Profil sumber informasi non-dokumenter untuk mendukung kegiatan dokumentasi budaya, misalnya Profil Ahli Budaya dan Profil Lembaga Budaya.

Disamping membuat Profil sumber informasi non-dokumenter, pustakawan dan arsiparis dapat juga menggunakan prinsip dan teknik *Cultural Mapping* atau Pemetaan Budaya yang menghasilkan dokumen inventaris berupa peta sumber informasi non-dokumenter. *Cultural Mapping* atau Pemetaan Budaya adalah

“...serangkaian kegiatan dan proses yang pada umumnya secara kolaboratif melibatkan komunitas atau masyarakat untuk mencatat, melestarikan, dan mendayagunakan asset budaya lokal baik berupa budaya benda maupun budaya takbenda pada suatu wilayah” (Kusnandar & CMS, 2022, 59). Penerapan prinsip dan teknik *Cultural Mapping* dapat dikaitkan dengan beragam konteks, termasuk untuk kepentingan inventarisasi sumber informasi non-dokumenter. Dalam hal ini, inventarisasi sumber informasi non-dokumenter dilakukan dengan cara mencatat Profil Ahli Budaya atau Lembaga Budaya serta pada saat yang sama menandai lokasi geografis dari Ahli atau Lembaga Budaya tersebut pada sebuah peta bumi, misalnya menggunakan *Google Map* (lihat contoh pada Gambar 1).



Sumber: petabudaya.wordpress.com (n.d.)

Gambar 1 Contoh Peta Sumber Informasi Non-Dokumenter Menggunakan Google Map.

Penandaan lokasi geografis sumber informasi non-dokumenter secara visual pada peta bumi dilakukan untuk mempermudah masyarakat yang akan mengakses sumber informasi tersebut untuk kepentingan penggalan data, misalnya wawancara dengan narasumber Ahli Budaya atau menghubungi Lembaga Budaya untuk mendapatkan petunjuk atau informasi tentang suatu karya budaya.

Sebagaimana pemilihan sumber informasi dokumenter, pada konteks pemilihan sumber informasi non-dokumenter pun, pustakawan dan arsiparis perlu mempertimbangkan kredibilitas sumber informasi. Berikut ini hal-hal yang perlu dipertimbangkan ketika pustakawan atau arsiparis akan memilih dan menghimpun data sumber informasi non-dokumenter:

- Untuk menentukan sumber informasi non-dokumenter yang termasuk Ahli/Pelaku Budaya Formal (misalnya: Peneliti Budaya, Antropolog Budaya, Sejarawan Budaya, dan Filolog), kredibilitasnya ditentukan dari seberapa banyak karya tulis atau penelitian

yang dilakukan oleh yang bersangkutan. Semakin banyak karya tulis atau penelitian yang dipublikasikan oleh seorang Ahli/Pelaku Budaya Formal pada suatu subjek karya budaya, semakin besar kemungkinan memiliki kredibilitas yang tinggi. Misalnya, jika seorang Antropolog banyak melakukan penelitian dan membuat karya tulis tentang seluk-beluk adat istiadat Suku Baduy, maka dapat dikatakan bahwa yang bersangkutan sangat besar kemungkinannya untuk dapat dikatakan sebagai sumber informasi yang ahli terkait adat istiadat Suku Baduy. Dengan kata lain, untuk dapat melihat seberapa ahli seseorang yang termasuk Ahli/Pelaku Budaya Formal, maka dapat dilihat dalam daftar publikasi ilmiahnya, misalnya melalui akun *Google Scholar* yang dimiliki oleh yang bersangkutan.

- Dalam menentukan kredibilitas Ahli/Pelaku Budaya Non-formal (misalnya: tokoh adat, sesepuh atau orang yang dituakan, seniman, budayawan) sebagai sumber informasi non-dokumenter ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan, yaitu: (1) *Intensitas Enkulturasasi*; proses natural seseorang dalam mempelajari suatu budaya. Natural yang dimaksud dalam hal ini adalah proses pembelajaran yang dilakukan oleh seseorang dalam kehidupan sehari-hari dan berkelanjutan dalam kurun waktu tertentu. (Spradley, 1979). Semakin intensif proses enkulturasasi seseorang dalam mempelajari suatu karya budaya, semakin berpotensi menjadi sumber informasi yang kredibel; (2) *Sumber Enkulturasasi*; cara seseorang memperoleh pengetahuannya (*methods of knowing*) yakni antara lain: intuisi (berdasarkan perasaan atau naluri), otoritas (bersumber dari sosok yang dianggap memiliki kekuasaan atas dirinya), rasionalisme (berdasarkan logika atau penalaran), empirisme (bersumber dari pengamatan dan pengalaman), dan metode ilmiah (melalui metode ilmiah dengan mengumpulkan dan mengevaluasi bukti secara sistematis untuk menguji gagasan dan menjawab pertanyaan) (Price, Jhangiani, Chiang, Leighton, & Cuttler, 2017). Semakin beragam (lebih dari satu) cara seseorang mempelajari suatu karya budaya, semakin memiliki potensi sebagai sumber informasi yang kredibel; (3) *Motivasi Enkulturasasi*: terdiri dari dua motivasi yakni: *mastery goals*, belajar dengan tujuan untuk menguasai materi dan mengembangkan

kompetensi diri dan *performance goals*, belajar dengan tujuan untuk bisa tampil lebih baik dibandingkan dengan orang lain (Murayama, 2018). Dalam hal ini, seseorang yang lebih dominan motivasinya untuk *mastery goals* memiliki kredibilitas lebih baik sebagai sumber informasi karena pada umumnya orang tersebut cenderung lebih memahami suatu karya budaya karena memiliki dorongan untuk mendalami dan menguasai materi budaya; dan (4) *Rekognisi dan Otoritas Sosial*; seseorang yang dianggap kredibel sebagai sumber informasi, tentunya memiliki kualitas pengetahuan atau keterampilan yang baik dalam suatu karya budaya. Pada umumnya, kredibilitas seseorang terkait suatu pengetahuan atau keterampilan dapat diketahui setidaknya melalui rekognisi atau pengakuan masyarakat setempat. Menurut Brandom (2009 dalam McQueen, n.d.), seseorang yang dianggap memiliki otoritas hanya jika mendapat rekognisi atau pengakuan atas otoritas tersebut dari orang lain.

- Dalam konteks menempatkan Lembaga Budaya Pemerintah sebagai sumber informasi non-dokumenter (misalnya: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Lembaga Penelitian, Museum, Perpustakaan, dan lain-lain), penentuan kredibilitasnya tidaklah sulit. Lembaga Pemerintah tentunya berkewajiban atau dituntut untuk memiliki akuntabilitas dan performa kerja yang baik dalam hal pelayanan publik. Dengan demikian, secara otomatis Lembaga Budaya Pemerintah seharusnya memiliki kredibilitas yang tinggi sebagai sumber informasi non-dokumenter.
- Penentuan kredibilitas Lembaga Budaya Non-pemerintah sebagai sumber informasi non-dokumenter (misalnya: Komunitas Budaya, Komunitas Seni, Paguyuban Seni, dan lain-lain) setidaknya dapat dilihat dari fokus atau tujuan lembaga tersebut. Semakin spesifik tujuan atau semakin fokus bidang garapan lembaga tersebut dalam suatu karya budaya, semakin berpeluang untuk memiliki tingkat kredibilitas yang tinggi. Misalnya, jika suatu Komunitas Budaya secara khusus didirikan dengan tujuan untuk mengkaji dan melestarikan Seni Musik Bambu, maka Komunitas Budaya tersebut dapat dianggap kredibel sebagai sumber informasi dalam hal serba-serbi Seni Musik Bambu. Selain itu, jika keberadaan suatu Komunitas Budaya sudah cukup lama sejak masa pendiriannya, maka semakin memiliki peluang untuk dapat

dikatakan sebagai sumber informasi yang kredibel. Keberadaan suatu Komunitas Budaya yang sudah cukup lama setidaknya dapat mengindikasikan bahwa lembaga tersebut memiliki komitmen dalam jangka panjang dan berkelanjutan.

SIMPULAN

Setelah memaparkan beberapa hal penting tentang inventarisasi sumber informasi dokumenter dan non-dokumenter dapat disimpulkan bahwa pustakawan dan arsiparis dapat berkontribusi dalam kegiatan dokumentasi budaya. Peran tersebut terutama terkait dengan kompetensi pustakawan dan arsiparis sebagai ahli informasi yang memiliki kapasitas dalam memilih serta menyediakan sumber-sumber informasi dokumenter dan non-dokumenter yang kredibel terkait dengan suatu karya budaya. Penyediaan sumber informasi dokumenter yang dapat dilakukan oleh pustakawan atau arsiparis bisa berupa penyusunan Bibliografi Beranotasi (*Annotated Bibliography*) dari sumber informasi primer dan sekunder. Dalam memilih sumber informasi dokumenter yang kredibel, pustakawan dan arsiparis dapat menerapkan prinsip CRAAP (*Currency, Relevance, Authority, Accuracy, and Purpose*). Sementara itu, dalam konteks sumber informasi non-dokumenter, pustakawan dan arsiparis dapat membuat Sketsa Bibliografi atau Profil Ahli/Pelaku Budaya Formal, Ahli/Pelaku Budaya Non-formal, Lembaga Budaya Pemerintah maupun Lembaga Budaya Non-pemerintah. Selain itu, inventarisasi sumber informasi non-dokumenter tersebut dapat juga menggunakan prinsip dan teknik *Cultural Mapping* atau Pemetaan Budaya. Dengan demikian, selain menyusun profil sumber informasi non-dokumenter, pustakawan atau arsiparis pun dapat menandai lokasi geografis dari sumber informasi tersebut di dalam sebuah peta bumi, misalnya menggunakan fitur *Google Map*. Penandaan sumber informasi non-dokumenter dalam sebuah peta bumi, diharapkan dapat lebih memudahkan masyarakat untuk mengakses sumber informasi non-dokumenter. Lebih lanjut, untuk memastikan kredibilitas sumber informasi non-dokumenter, pustakawan atau arsiparis perlu memperhatikan beberapa hal antara lain: (1) jejak rekam karya tulis dari seorang Ahli/Pelaku Budaya Formal (misalnya dalam *Google Scholar*); (2) intensitas enkulturasi, sumber enkulturasi, motivasi enkulturasi, serta rekognisi dan otoritas sosial dari seorang Ahli/Pelaku Budaya Non-formal; (3) adanya

kejelasan tujuan dan masa eksistensi yang cukup lama dari Lembaga Budaya Non-pemerintah. Sementara itu, Lembaga Budaya Pemerintah dapat dipastikan memiliki kredibilitas yang tinggi sebagai sumber informasi mengingat adanya tuntutan akuntabilitas dan kinerja yang baik dalam hal pelayanan publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Concordia University Library. (May 29, 2020). *How to write an annotated bibliography*. Retrieved April 21, 2022, from <https://library.concordia.ca/help/writing/annotated-bibliography.php>
- Departemen Kebudayaan dan Pariwisata. (2009) *Buku panduan praktis pencatatan warisan budaya takbenda indonesia*. Jakarta: Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia dan Kantor UNESCO Jakarta.
- George, T. (September 16, 2021). *Credible sources and how to spot them*. Scribbr. Retrieved April 7, 2022, from <https://www.scribbr.com/citing-sources/credible-sources/>
- Hood, D. (2013, August 2). *Writing creative nonfiction: the profile/biography sketch*. Retrieved October 17, 2022, from <https://davehood59.wordpress.com/2013/08/02/writing-creative-nonfiction-the-profilebiography-sketch>
- IFLA. (May 22, 2019). *IFLA statement on indigenous traditional knowledge*. Retrieved October 17, 2022, from <https://www.ifla.org/publications/ifla-statement-on-indigenous-traditional-knowledge>
- Kusnandar, Erwina, W., & CMS, S. (2020). *Dokumentasi budaya: inventarisasi dan perekaman warisan budaya tak benda*. Bandung: Raness Media Rancage.
- Kusnandar & CMS, S. (2022). Pemetaan budaya: inventarisasi budaya berbasis geografis. *Jurnal Kajian Budaya dan Humaniora*, 4(1), 55-65.
- MBA Skool Team. (May 17, 2012). *Organizational profile - meaning & definition*. Retrieved October 17, 2022, from <https://www.mbaskool.com/business-concepts/human-resources-hr-terms/2447-organizational-profile.html>
- McQueen, P. (n.d.). *Social and Political Recognition*. *Internet encyclopedia of philosophy*. Retrieved March 8, 2022, from https://iep.utm.edu/recog_sp/
- Murayama, K. (2018, June). *The science of motivation*. American Psychological Association. Retrieved March 9, 2022, from <https://www.apa.org/science/about/psa/2018/06/motivation>
- Price, P. C., Jhangiani, R., Chiang, I. A., Leighton, D.C. & Cuttler, C.. (August 21, 2017). *Methods of knowing*. Research methods in psychology. Retrieved March 18, 2022, from <https://opentext.wsu.edu/carriecuttler/chapter/methods-of-knowing>
- Singh, G. (2013). *Information sources, services and systems*. PHI Learning Private Limited
- Spradley, J.P. (1979). *The ethnographic interview*. Florida: Harcourt Brace Jovanovich College Publishers.
- UNESCO. (2002). *Cultural diversity: common heritage plural identities*. Paris: UNESCO